

Bab I

Pendahuluan

Kongres Partai Komunis Vietnam pada tahun 1986 menetapkan Nguyen Van Linh sebagai Sekretaris Jenderal partai Komunis Vitenam untuk lima tahun berikutnya. Terpilihnya Linh membawa perubahan kebijakan baik ekonomi maupun politik yang cukup besar bagi Vietnam. Pemikiran Linh tersebut dituangkannya dalam Pemikiran Baru atau Doi Moi, Canh Tan atau Renovasi dan Cong Khai atau Keterbukaan (Charles A. Joiner, 1990:1055). Pemikiran baru yang dimaksudkan adalah meninggalkan pemikiran lama yang statis, birokratik, penuh dengan rencana terpusat, harga pasar yang berdasar atas multisektor ekonomi serta produksi non subsidi dan berorientasi pada laba.

Ide Linh ini tentu saja sangat jauh berbeda dengan apa yang sebelumnya di terapkan dalam kebijakan ekonomi maupun politik Vietnam yang sosialis. Negara cenderung memegang control terhadap ekonomi maupun politik serta tidak member sedikitpun akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam baik kegiatan ekonomi maupun politik. Ide Linh tentu saja akan merubah kebijakan Vietnam secara mendasar. Doi Moi ditetapkan Linh untuk meningkatkan produksi dan standar hidup rakyat Vitenam serta korupsi yang luar biasa dalam tubuh partai dan pemerintahan. Can Tanh lebih dimaksudkannya untuk mengurangi internvensi partai yang terlalu dalam organ pemerintah maupun non pemerintah. Sedangkan Cong Khai merupakan ide Linh untuk memperkuat peran serta rakyat dalam negara.

Kebijakan semacam ini sesungguhnya merupakan tantangan besar bagi elit karena implikasi yang tidak kecil dalam bidang social politik. Hal ini terutama berkenaan dengan kedudukan para elit itu sendiri dalam memimpin negara dan atau berkuasa. Seperti yang diungkapkn oleh Robison bahwa pendalaman kapitalisme akan menuntut adanya perbaikan dalam kebijakan negara dan sifat hubungan antara kekuatan-kejuatan social politik yang ada. Pertama secara bertahap negara harus mundur dari kepemilikan atas modal dan intervensi pasar. Hal ini akan memungkinkan usaha bagi swasta untuk dapat bersaing secara local maupun internasional dan memanfaatkan pasar secara optimal. Kedua, perubahan kepemilikan capital akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam ekonomi. Kebijakan pemerintah akan ditujukan bagi pengelolaan modal dan lembaga ekonomi secara umum bukan lagi bagi kelompok-kelompok tertentu saja (Kevin Hewison et. All, 1993:26). Bagi Robison, ketika pertumbuhan modal swasta sangat tinggi dan ekonomi nasional terintegrasi dengan ekonomi internasional maka usaha untuk mengintervensi pasar akan semakin sulit. Hal ini disebabkan karena, pertama, negara otoriter tidak akan mampu menyediakan aturan-aturan yang dapat mengatur mekanisme dalam system kapitalis. Kedua, hubungan baru negara dan kapitalis membutuhkan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka rezim yang otoriter. Ketiga, perubahan terhadap usaha-usaha ekonomi negara akan memperlemah basis kekuatan elit yang berkuasa. Singkatnya, ekonomi pasar dan negara otoriter merupakan satu hal yang tidak mungkin dapat berjalan dengan baik.

Dengan berbekal kegagalan reformasi ekonomi sebelumnya, ide Linh ini justru sangat serius dilaksanakan Linh melalui beberapa kebijakan ekonomi mapun

politik. Kegagalan reformasi ekonomi yang dialami Vietnam sebelumnya adalah New Economic Reform tahun 1979 dan Economic Reform tahun 1985.

Instruksi No 35 Resolusi Kongres ke 5 Partai Komunis Vietnam menyebutkan bahwa ekonomi rumah tangga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi sosialis dan dapat memperkuat pembangunan ke arah yang lebih baik.. Kebijakan ini kemudian diterjemahkan melalui Instruksi Sekretariat Partai No. 100 CT/TU Januari 1981 yang berisi mengenai perluasan dan penyempurnaan system kontrak berdasarkan produk akhir dalam pertanian atau *ens product contract*. Sistem ini bukanlah merupakan system kapitalis seperti yang dituduhkan oleh para pegamat dari barat, melainkan sebuah upaya pemerintah untuk menumbuhkan inisiatif petani agar dapat berproduksi lebih baik lagi. Melalui kebijakan ini tanggung jawab untuk memenuhi kontrak diletakkan pada setiap rumah tangga yang mengadakan pembagian kerja berdasarkan hubungan dalam keluarga. Tanggung jawab produksi kemudian berada di pundak setiap keluarga yang terikat dalam tim produksi dalam setiap badan kerjasama petani-negara (*co-operativization*), yaitu dalam hal pembibitan, penanaman dan panen. Sementara irigasi, pupuk dan control hama masih dalam tanggung jawab kolektif. Kelebihan dari sistem ini adalah penyediaan insentif bagi peningkatan hasil pertanian dengan menetapkan kuota produk dalam setiap badan kerjasama pertiga tahun. Jika petani mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditutup dalam masa panen berikutnya kecuali karena cuaca yang memang kurang menguntungkan bagi penanaman. Jika petani mengalami surplus, maka kelebihan hasil tersebut boleh diperjualbelikan dalam pasar bebas atau agen pembelian negara dengan harga yang

disepakati bersama. Melalui Instruksi Politbiro No. 67/CT/TU Juni 1985, kebijakan ini diperluas ke berbagai sektor seperti peternakan, perikanan dan kehutanan.

Penerapan kebijakan yang memberikan keleluasaan lebih pada ekonomi rumah tangga ini menjadikan produksi pertanian khususnya padi meningkat. Hal ini lebih disebabkan karena system ini merupakan system baru yang terdengar menarik bagi petani dengan insentifnya. Diterapkannya teknologi yang lebih baik serta dukungan factor cuaca telah memberikan kontribusi yang besar bagi produksi pertanian (Vo Nanh Tri, 1990:137). Di sisi lain Taylor menandai bahwa pertumbuhan ini lebih dipicu oleh adanya kelonggaran kontrol negara terhadap aktifitas ekonomi rakyat (KW Taylor, 1985:149). Namun demikian, pada kontrak 3 tahun berikutnya, sistem ini mengalami penurunan hasil pertanian yang lebih disebabkan pada kurangnya semangat dari anggota co-operative untuk bekerja di bawah system. Dimana para pejabat lokal mulai menaikan kontrak kuota karena khawatir pada petani tersebut akan menjadi kaya. Dengan demikian, maka surplus yang dimiliki petani semakin kecil dan ini cukup membuat petani kecewa terlebih lagi ketika mereka harus membayar pajak pertanian sebesar 13-15% dari hasil pertanian (Vo Nanh Tri: 1990:63). Sementara itu harga yang ditetapkan pun tidak lagi rasional karena cuaca yang tidak mendukung produksi pertanian. Penurunan ini agaknya tidak luput dari kekhawatiran pemerintah atas hilangnya control sehingga berusaha kembali menguasai kekuatan ekonomi yang muncul dan tidak dapat dikendalikan (KW Taylor: 1985:149).

Seperti halnya dalam pertanian , industri skala kecil dan kerajinan harus melalui bentuk kolektif yang harus selesai pada tahun 1985. Hal ini disebutkan dalam Resolusi Sidang Pleno Komita Sentral ke 4 Juni 1983 bahwa, adalah merupakan suatu

kesalahan jika tidak meletakkan pertanian sebagai ujung tombak perekonomian. Namun demikian akan merupakan suatu kesalahan juga jika tidak memberikan perhatian pada periode transisi menuju sosialisme yaitu industri sosialis yang mengkombinasikan pertanian dengan industri dan memberikan prioritas pada pembangunan industri berat. Agaknya keputusan ini dan juga pidato Le Duan (anggota Politbiro) pada sidang pleno Komite Sentral ke-6 Juli 1984 yang memberikan prioritas pada pembangunan industri berat di samping industri barang barang konsumsi menjadi suatu keputusan yang kurang tepat. Investasi yang lebih besar dalam industri berat di dibandingkan industri ringan, dilihat Trion Chinh sebagai suatu kesalahan 'golongan kiri'. Alokasi investasi yang terlalu besar dalam industri berat mengakibatkan masalah kekurangan bahan pangan pokok dan barang barang konsumsi terus terjadi. Ada ketidakseimbangan dalam level makro seperti dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pertama.

Pembenahan manajemen perusahaan negara agaknya masih jauh yang diharapkan. Instruksi Dewan Menteri 156/HDBT November 1984 diantaranya untuk melaksanakan pertanggungjawaban ekonomi serta financial perusahaan Negara kurang berjalan dengan baik. Vo Van Kiet, Ketua Komite Perencanaan Negara pada waktu itu, berkomentar pada akhir tahun 1984, bahwa hasil akhir dari transformasi sosialis itu seharusnya adalah peningkatan produktifitas dan keuntungan bagi perusahaan. Tetapi, manajemen yang sangat buruk mengakibatkan produktifitas sangat rendah bahkan deficit. Dengan demikian, transformasi sosialis justru mengakibatkan perusahaan berada dalam stagnasi, produktifitas yang semakin menurun, kualitas yang rendah dan biaya produksi yang semakin menurun (Vo Nanh Tri, 1990:145).

Akhir dari Rencana Pembangunan Lima Tahun ke 3 menunjukkan kondisi yang tidak baik, dimana harga barang-barang kebutuhan naik hingga dua kali lipat, menurunnya produktivitas pertanian maupun industri negara maupun swasta serta kekurangan pangan yang mengakibatkan buruknya kondisi kesehatan rakyat Vietnam. Dalam bidang moneter hal yang sama juga terjadi yang mengakibatkan penggunaan kupon subsidi yang merupakan kebijakan Juli tahun 1985 dihentikan. Kebijakan ini juga dilanjutkan dengan kebijakan Maret 1986 yaitu pembatasan terhadap aktifitas perusahaan swasta dan industri kecil untuk mengontrol inflasi serta berusaha menstabilkan daya beli yang rusak karena kebijakan Juli 1985.

Kebijakan yang cenderung reformis tersebut menuai hasil yang tidak maksimal. Kritikan yang tajam terhadap pilihan kebijakan tersebut. Pam Hung seorang anggota Politbiro misalnya, mengungkapkan bahwa seharusnya control partai terhadap proses renovasi ekonomi merupakan hal yang sangat penting. Ia mengemukakan pentingnya pembangunan organisasi partai di selatan, pendidikan yang lebih baik bagi anggota partai dan pengetahuan teknis dan spesialisasi bagi organisasi partai. Bahkan pada kongres yang diadakan di Propinsi Cuu Long, ia menggarisbawahi pentingnya transformasi sosialis dan control negara terhadap reformasi dan pengambilan keputusan di bidang ekonomi yang lain. Bagi Pam Hung, Negara harus menguasai pasar dan kontrol terhadap distribusi demi efektifitas produksi (Vo Nanh Tri, 1990:182).

Namun demikian, kebijakan reformis mendapat jalannya dalam pemerintahan Vietnam dengan terpilihnya Nguyen Van Linh dalam Kongres Nasional Partai Ke 6 Desember 1986. Terpilihnya Linh memberikan jalan yang lebih baik bagi kebijakan-kebijakan reformis. Linh sendiri mendapatkan keleluasaan dalam menjalankan

apa yang mejadi pemikirannyad alam Doi Moi atau pemikiran Baru. Pemikiran Baru yang dimaksudkan adalah meninggalkan pemikiran lama yang statis, birokratik penuh dengan rencana terpusat dan petunjuk serta subsidi dan digantikannya dengan socialist accounting, harga pasar yang berdasarkan atas multisektor ekonomi serta produksi non subsidi dan berorientasi pada laba.

Bab II

Perumusan Masalah

Dari uraian dalam pendahuluan tersebut, penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab latar belakang kebijakan Doi Moi setelah gagalnya New Economic Reform dan Economic Reform sebelumnya dan bagaimana Doi Moi diselenggarakan di Vietnam.

Bab III

Tinjauan Pustaka

Politik birokratik merupakan teori yang menggambarkan struktur negara sebagai arena dimana para pejabat penentu kebijakan melakukan maneuver-manuver politik untuk mendapatkan hasil politis yang didapatkan . Mereka membangun koalisi, melakukan tawar menawar, berkompromi, melakukan kooptasi dan strategi lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan pribadi maupun organisasinya (Mark Turner dan David Hume, 1997:58). Kekuasaan yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi kebijakan tergantung dimana ia duduk atau posisi pekerjaannya, sebab hal ini akan mempengaruhi cara pandangya terhadap isu-isu yang ada. Oleh karena itu pulalah actor-actor tersebut akan selalu terlibat dalam konflik yang konstan dalam menentukan berbagai alternatif dan cara-cara mengimplementasikannya. Berkaitan dengan konflik yang konstan yang terjadi dalam kepemimpinan kolektif negara komunis, Thornton berpendapat bahwa apa yang sesungguhnya terjadi dalam sistem komunis bukanlah sebuah kediktatoran yang stabil melainkan sebuah konflik yang terus menerus terjadi dalam kepemimpinan kolektif mereka (Mark Turner dan David Hume, 1997:69).

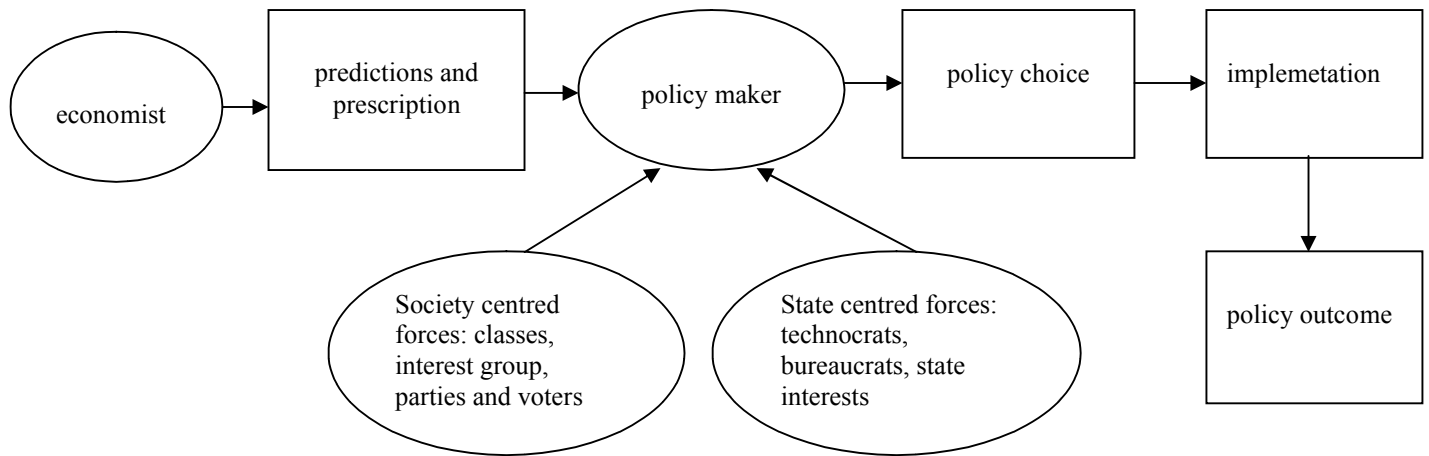
Sementara menurut Allison, model Politik Birokratik lebih memusatkan perhatian pada level individu yang ada di dalam pemerintahan dan interaksi diantara mereka, sebagai penentu tindakan suatu pemerintahan dalam politik internasional. Keputusan luar negeri adalah hasil proses tawar menawar diantara pemain yang memiliki posisi dalam hierarki pemerintahan dan bukan hasil pertimbangan yang rasional.

Unit analisa dari model ini adalah tindakan pemerintah yang didefinisikan sebagai berbagai tindakan pra pejabat sesuatu pemerintah dalam menerapkan wewenang pemerintah yang bisa dilihat dari luar pemerintah. Maka jika kita ingin mengetahui mengapa suatu keputusan luar negeri dibuat, ada 3 hal yang dapat menjadi pertanyaan, yaitu: pertama, siapa yang terlibat dalam pengambilan kebijakan tersebut?. Kedua, hal-hal apa saja yang menentukan pendirian setiap pemain? Apa yang menentukan persepsi? Bagaimana mereka mendefinisikan isu?. Ketiga, bagaimana pendirian yang saling berbeda tersebut diintegrasikan? (Graham T. Allison, 1971: 341-360).

Di dalam system politik terpusat seperti Vietnam, kekuasaan dalam pengambilan keputusan hanyalah dimiliki oleh beberapa orang saja. Kongres yang hanya dilakukan dalam 5 tahun sekali hanya untuk menyetujui garis besar rencana jangka panjang saja. Sementara Komite Sentral masih merupakan Organisasi yang besar sebagai wadah perdebatan yang efektif. Dengan begitu, pembuatan keputusan yang sebenarnya terletak di tangan segelintir orang saja atau di tangan Politbiro (Dell Gillette Hitchner dan Carol Levine, 1981:153). Sebagai pusat kekuasaan partai, Politbiro memiliki otoritas penuh untuk menentukan langkah strategi dalam sidang pleno partai yaitu dengan mentranslasikan resolusi Komite Sentral dalam garis-garis besar kebijakan partai yang lebih konkret. Ia juga bertanggung jawab untuk menformulasikan, mendiskusikan dan memecahkan masalah jangka panjang serta memastikan kesatuan politis dan ideology dalam partai (Gary Porter, 1993:66). Dalam pandangan Meier, segelintir orang yang memiliki pengaruh lebih besar dalam proses pembuatan kebijakan ini dalam negara sentralistis lebih didominasi oleh mereka teknokrat, birokrat dan kepentingan negara

dibandingkan kelas dalam masyarakat, kelompok kepentingan dan juga partai dan para pemilihnya seperti halnya dalam negara demokratis.

Diagram Proses Pembuatan Kebijakan Meier



Sumber: Gerard Meier, ed., Politics of Policy making in Developing Countries, perspective in new Political Economy, An International Center for Economic Gorwth Publication, ICS Press, San Franscisco, th. 1991. hal 4.

Dalam pendekatan negara sebagai pusat, negara merupaakn institusi yang otonom dan memiliki keinginanya sendiri. Kebijakan elit akan menjadi kebijakan bagi seluruh masyarakat dan oleh karenanya bersifat aktif. Kekuatan-kekuatan utama dalam pendekatan ini adalah mereka para tekhnokrat yang mengabdikan diri bagi peningkatan kesejahteraan nasional, para birokrat dan pembuat kebijakan yang bertindak atas nama negara. Menurut Meier, dengan mempergunakan pendekatan negara sebagai pusat, akan lebih mudah mengamati proses pembuatan dan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan pada kebanyakan negaras eadng berkembang diperintah oleh junta militer atau rezim

satu partai dimana kebijakan ekonomi tidak ditentukan oleh perimbangan berbagai kelompok kepentingan. Pada negara-negara tersebut negara cenderung mengambil alih semua keinginan dan kebutuhan masyarakat,. Negara memegang control atas kekuatan administrasi yang mampu menformulasikan kebijakan atas nama kelompok minoritas pemegang kekuasaan (Gerard Meier, 1991:18).

Para penstudi komunisme melihat adanya kecenderungan mengenai bergesarnya factor ideology sebagai penentu pengambilan kebijakan dan rekrutmen. Mereka justru melihat kepentingan elit politik lebih dominant dalam hal ini. Kondisi ini mengemukakan fenomena koflik faksi yang terjadi dalam badan eksekutif Partai Komunis Vitenam. Konflik dalam partai atau faksi atau yang disebut bung-di dalam bahasa Vietnam dapat mengubah konfigurasi dalam badan sekretariat partai dan juga kementrian Negara ssuai dengan tjuan-tujuan yang hendak dicapai oleh faksi yang berhasil memegang control dalam komita sentral. Faksi faksi yang kuat bergulat dalam Politbiro dan juga komite sentral terbagi menjadi dua poros yakni faksi reformis yang dimotori oleh para tekhnokrat dan juga golongan militer dan di sisi lain ada faksi konserfativ yang dimotori oleh para birokrat. Pada akhir tahun 80-n dan di awal 90-an menjadi awal yang pentig bagi Doi Moi. Pike melihat bahwa faksi-faksi yang ada mulai bergulat antara mereka reformis (Nguyen Van Linh, Vo Van Kiet, Mai Chi Tho) serta mereka para konservatif (Do Muoi, Vo Chi Chong, Nguyen Duc Tam, Le Duc Anh, Doan Khue dan Dong Sy Nguyen) mengenai resiko yang ditanggung ketika perubahan politik dilakukan. Para reformis menghendaki perubahan bagi percepatan ekonomi harus dilakukan karena resiko yang ada dinilai minim, sementara mereka para konservatif menghendaki sebaliknya karena resiko yang ada dinilai masih terlalu besar dan oleh

karenanya control Negara dalam kehidupan politik dan juga ekonomi masih harus dipegang dengan kuat (Douglas Pike, 1991).

Kepemimpinan kolektif dalam hal ini membutuhkan satu rentang waktu yang cukup panjang dalam pengambilan keputusan khususnya kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Dalam hal ini Kongres Nasional Partai yang diadakan lima tahun sekali berkewajiban untuk dapat membuat rencana bagi pembangunan social ekonomi. Waktu yang demikian terbatas harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para elit untuk mendapatkan kepentingannya. Pergulatan mereka dalam faksi-faksi ini tidak jarang harus berkompromi dengan waktu yang sangat pendek untuk memutuskan kebijakan sekaligus menempatkan orang-orang dalam posisi posisi penting. Konsensus pada akhirnya menjadi alternative utama untuk memutuskan setiap perdebatan. Dalam hal ini telah menjadi suatu preseden bahwa pada pos pos tertentu, Vietnam mempergunakan pembagian pos berdasarkan garis geografis ataupun faksi.

Meski demikian David P. Elliot berpendapat bahwa faksionalisme di Vietnam tidak benar benar berkompetisi tetapi mereka lebih memilih untuk menghindari konfrontasi dan mencapai consensus dengan berkompromi (Gareth Porter, 1993:115). Oleh sebab itu dalam pandangan Elliot, pembuatan kebijakan dalam pandangan system politik Vietnam lebih merupakan hasil dari usaha untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan dalam partai dan bukan hasil dari konflik dalam partai.

BAB IV

TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Mendapatkan gambaran cukup representatif mengenai pembuatan keputusan dalam negara sentralistis.
2. Memberikan sumbangan dalam studi pengambilan kebijakan Politik Birokratik

BAB V

PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan reformasi ekonomi yang memberikan peluang lebih besar bagi rakyat dalam kegiatan ekonomi rumah tangga pada awal tahun 80-an menuai kegagalan. Hal tersebut bahkan menjadikan kontrol negara kembali menguat di tahun 1985. Meski demikian, penghujung tahun 1986 justru terjadi sebuah peristiwa yang penting dengan diadopsinya kebijakan yang semakin memberikan keleluasaan kepada rakyat yang tidak saja dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang politik. Kebijakan ini bahkan mampu mendorong dirumuskannya kembali Undang-Undang Dasar Vietnam dan dihasilkannya Undang-Undang dasar yang baru pada tahun 1992.

1. Perdebatan dalam Tubuh Politbiro dan Kongres Nasional Partai ke-6

Kegagalan end-product contract pada tahun 1984-1985 menempatkan petani dalam kondisi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Akhir tahun 1985, Menteri Pertanian mengakui bahwa Vietnam belum berhasil memecahkan masalah kebutuhan bahan pangan pokok. Kebutuhan bahan pangan yang seharusnya 21 juta ton hanya dapat dipenuhi 18,2 juta ton saja (Vo nanh Tri, 1990:160).

Pada tanggal 25-30 agustus 1986 merupakan pertemuan Politbiro yang sangat penting karena menghasilkan strategi pembangunan yang didasarkan atas pengalaman yang telah ditempuh oleh Vietnam selama ini. Perubahan yang harus ditempuh oleh Vietnam tidak hanya meliputi perubahan arah kebijakan saja, melainkan

meliputi perubahan-perubahan dalam pemikiran, terutama dalam hal ekonomi serta perubahan dalam etos kerja, organisasi dan juga kaderisasi.

Sebelum Doi Moi mendapatkan tempatnya dalam kebijakan pemerintah Vietnam, serangkaian perdebatan antara elit politik mengenai kenyataan sosial politik. Stern mencatat adanya perdebatan antara kelompok reformis dan konservatif yaitu perdebatan mengenai sejauh mana kontrol negara terhadap aktifitas ekonomi (Lewis M.Stern, 1987:351-352). Perdebatan ini diwakili oleh Vo Van Kiet yang merupakan Ketua Komite Perencanaan Negara dan menteri Dalam Negeri Pam Hung menjelang diadakannya Kongres partai ke 6 Desember 1986. Kiet menyatakan bahwa proses perencanaan kurang fleksibel, gagal untuk memberikan batasan bagi rencana pusat sebagai suatu garis besar kebijakan ekonomi dan melempar tanggung jawab kepada eselon yang lebih rendah. Kiet mengusulkan agar pusat mengurangi perintah dan arahan yang terlalu rumit dan lebih berkonsentrasi pada pembangunan strategis, merencanakan dan mendefinisikan kebijakan dengan jelas dan mensupervisi pekerjaan eselon pada tingkat bawah. Kegagalan dari pembangunan strategi jangka panjang dari aparatur tertentu (makanan dan padi) dan program khusus (tanah dan buruh) disebabkan oleh personel yang kurang berkualitas, birokrasi yang sakit serta semangat kader yang kendor. Kiet menggarisbawahi pentingnya merevitalisasi organ perencana pada level distrik dan subdistrik serta meningkatkan rasa tanggung jawab dan pengambilan keputusan mereka.

Sementara itu, Pam Hung berpendapat bahwa kontrol partai terhadap proses renovasi ekonomi merupakan hal yang sangat penting. Ia mengemukakan pentingnya pembangunan organisasi partai di selatan, pendidikan yang lebih baik bagi

anggota partai dan pengetahuan teknis dan spesialisasi bagi organisasi partai. Pendapat yang bertentangan dengan Kiet dapat dilihat pada Sidang Pleno ke 8 tahun 1985 dimana Hung berusaha untuk menjadikan partai sebagai penengah masalah-masalah politik sementara Kiet lebih menekankan fleksibilitas partai dalam menjawab masalah-masalah yang muncul dalam manajemen pasar, kebijakan fiskal dan metode perencanaan.

Surat kabar resmi partai, *Ndan Dan*, yang memuat perdebatan tersebut mengindikasikan bahwa Politbiro gagal dalam menengahi perdebatan tersebut dan membuat resolusi bagi rencana implementasi kebijakan ekonomi. Hal tersebut membutuhkan studi yang mendalam mengenai pembuatan keputusan pada unit ekonomi, sebab selama ini masih banyak kendala atau kelemahan dalam proses formulasi rencana proyek ekonomi, kurangnya diskusi dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal, masih besarnya peranan negara dan partai dalam manajemen serta sebagai komite kontrol pasar. Partai masih berkeinginan untuk mengontrol pasar dengan alasan untuk menghindari ketidakstabilan harga, menghindari spekulasi dan kompetisi yang tidak terkontrol dalam pasar.

Persiapan menjelang Kongres Partai ke-6 di level distrik dapat dikatakan lebih matang daripada yang terjadi pada kongres-kongres sebelumnya baik dalam penyelenggaraannya maupun materi yang dibicarakan dan dihasilkannya. Menjelang kongres biasanya diadakan pertemuan organisasi partai pada level propinsi dan distrik untuk memberikan masukan bagi rancangan laporan politik yang akan disampaikan oleh Politbiro melalui sekretaris jenderal. Bahkan, beberapa distrik memberikan masukan mengenai arah dan tujuan politik serta pembangunan ekonomi selama rencana pembangunan ekonomi selanjutnya.

Beberapa propinsi memberikan kritik yang cukup keras terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan oleh negara. Misalnya yang disampaikan oleh Komite partai An Giang, bahwa kekurangan, kesalahan dan kelemahan dalam organisasi partai di tingkat propinsi telah menyebabkan kegagalan dalam produksi pertanian, munculnya authoritarianism, ketidakmampuan ekspor dan rendahnya fasilitas pendidikan di propinsi. Sementara itu, konres yang diadakan di The ha Son Binh mengkritisi adanya manajemen yang tidak rasional dalam jaringan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas pengawasan terhadap ekonomi rumah tangga, rendahnya peningkatan kualitas pekerja serta lambannya penerapan manajemen yang lebih praktis.

Pada suatu kesempatan di Ho Chi Minh, Kepala Negara Truong Chinh sendiri mengakui bahwa ada suatu kelemahan dan kesalahan yang serius di dalam kepemimpinan ekonomi, lebih didahulukan pembangunan superstruktur daripada infrastruktur, penekanan yang terlalu besar dalam proyek industri skala besar yang justru tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nasional, serta kesalahan dalam memutuskan kebutuhan bantuan luar negeri. Ia juga menggarisbawahi pengakuan Politbiro terhadap peranan produksi swasta dan industri skala kecil dalam konstelasi ekonomi Vietnam untuk waktu yang lama di masa depan. Chinh menandai konsep ekonomi yang lebih sistematis termasuk didalamnya mixed economy, dihapuskannya birokrasi sentralisme dalam praktek ekonomi serta desentralisasi pembuatan keputusan (Lewis Stern, 1987:490).

Namun demikian, mengacu pada keputusan sidang pleno ke 8 tahun 1985 yang menekankan ekonomi rumah tangga, peningkatan lapangan kerja dan manajemen dan manajemen terpusat terhadap pasar dan perdagangan. Demi terlaksananya keputusan

ini, Pam Hung menggarisbawahi pentingnya transformasi sosialis dan kontrol negara terhadap reormasi dan pengambilan keputusan ekonomi lainnya. Pada kongres yang dilaksanakan di propinsi Cuu Long. Baginya, negara harus menguasai pasar dan kontrol terhadap distribusi demi efektifitas produksi.

Perdebatan antara kedua faksi masih terus berlangsung hingga diadakannya Kongres Partai ke-6, 15-18 Desember 1986. Kepala Negara, Truong Chinh dalam pidatonya menggambarkan lemahnya produksi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat Vietnam, investasi yang salah arah, sumber daya yang tidak tergalil secara optimal, inflasi yang semakin tinggi, sirkualsi barang yang kacau karena sistem, ketidakseimbangan ekonomi, munculnya kecenderungan anti sosialis dan yang paling parah adalah menurunnya kepercayaan rakyat dalam kepemimpinan. Chinh menandai kesalahan dan kelemahan dalam kepemimpinan ekonomi dan sosial yang dilakukan partai berasal dari 3 hal, yaitu: ideologi, organisasi dan menurunnya kinerja kader partai (Carlyle A. Thayer, 1987:13-14). Namun pada solusi dari persoalan yang ditawarkan Chinh masih memandang perlunya demokrasi sentralisme sebagai mekanisme yang mamapu menjamin persatuan dan kebijakan baru mengenai otonomi yang diberikan kepada bisnis dan unit administratif serta majemen terpusat pada barang barang strategis (Lewis M. Stern, 1987:360).

Sedangkan Vo Van Kiet yang mengantarkan laporan ekonomi mengatakn bahwa akan ada renovasi dalam ekonomi dan sistem manajemen. Jika sebelumnya pembangunan ekonomi menitik beratkan pembangunan industri berat, maka arah dari kebijakan pembangunan ekonomi kali ini lebih menitik beratkan pada pembangunan pertanian. Industri berat hanyalah merupakan penunjang pertanian dan industri ringan

dalam skala yang tepat dan level teknologi yang sesuai. Pada kesempatan tersebut Kiet juga menawarkan solusi yaitu dengan menitikberatkan produksi padi dan makanan, barang-barang konsumsi dan ekspor (Carlyle A Thyer, 1987:15).

Pembicara lainnya, Nguyen Van Linh, menyatakan bahwa kegagalan yang dialami oleh partai yang diakibatkan oleh lemahnya produksi, tidak tertatanya sistem distribusi, kerumitan-kerumitan yang terjadi dalam masalah sosio ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Lewis M. Stern, 1987:360).

Seperti pendapat Elliot, konflik dalam tubuh partai cenderung menunjukkan keseimbangan kelompok reformis dan kelompok konservatif, antara pengetatan kontrol negara terhadap proses ekonomi serta manajemen ekonomi dan pengambilan keputusan dalam level lokal secara lebih fleksibel. Hal ini dapat dilihat dalam Resolusi yang dikeluarkan oleh Kongres partai ke-6 tanggal 18 Desember 1986, yaitu rencana transformasi industri dan perdagangan swasta secara bertahap, menggarisbawahi validitas kontrak antara produksi dari perusahaan swasta, melanjutkan kebijakan distribusi pekerja serta kebijakan mengenai sosial ekonomi yang sudah dirintis sejak tahun 1976 dan 1982. Secara lebih formal Kongres ke 6 ini meletakkan langkah kebijakannya dalam Rencana Lima Tahunan 1986-1990 sebagai berikut: 1. Produksi yang cukup bagi konsumsi dan modal, 2. Menata kembali struktur ekonomi terutama investasi, 3. Membangun sebuah hubungan produksi yang 'sempurna' sesuai dengan karakter dan level dari kekuatan produksi, 4. Mengadakan perubahan sosial yang berarti, khususnya dalam masalah pekerja dan distribusi pendapatan, dan 5. Memperkuat pertahanan nasional dan keamanan internal (Vo Nanh Tri, 1990:183-184).

2. Perubahan Kepemimpinan

Meskipun arah kebijakan yang telah diputuskan dalam Kongres nasional Partai ke-6 mencerminkan kekuatan masing-masing kelompok konserfativ dan reformis, kecenderungan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih longgar terhadap aktifitas ekonomi terbuka lebar dengan diangkatnya Nguyen van Linh, seorang anggota Politbiro yang memiliki pandangan reformis, menjadi sekretaris jenderal PKV menggantikan Le Duan yang meninggal pada pertengahan tahun 1986 dan setelah 16 tahun berkuasa. Dukungan terhadap Linh didapat dari koleganya yang bersama sama terlibat dalam perang Vietnam Selatan pada pertengahan dan akhir 60an. Linh juga mendapatkan dukungan dari banyak anggota massa lain karena dialah yang mengadakan rekonsiliasi antara partai dan etnik Cina, Khatolik dan mantan anggota pemerintahan Saigon. Oleh karenanya, koalisi yang mendukungnya memiliki slogan "the north won the war, the south must manage the economy".

Selain dipilihnya seorang sekretaris jenderal partai yang memiliki kekuasaan yang demikian luas dari kalangan reformis, Kongres ke-6 ini juga ditandai oleh perubahan keanggotaan dari politbiro, dimana 6 anggota senior Politbiro mundur. Sementara itu, perubahan juga terjadi di dalam keanggotaan Komite Sentral, dimana dominasi dari golongan tua atau mereka yang terlibat langsung dalam eprang Vietnam berakhir. Situasi ini terjadi akibat adanya regularisasi politik yang dimulai semenjak tahun 1975 (Carlyle Thayer, 1987:16). Regularisasi politik ini menetapkan dilakukannya kongres nasional partai setiap 5 tahun sekali yang bertujuan untuk mengadakan evaluasi terhadap kebijakan partai dan memilih keanggotaan baru dalam Politbiro dan Komite

Sentral. Dengan demikian, selain mengakhiri kepemimpinan 'generasi 1951' atau golongan tua, regularisasi politik ini mulai merekrut anggota yang lebih muda berdasarkan pengalaman karir dalam partai, komposisi Komite Sentral pun berubah diaman perwakilan dari propinsi banyak ditarik dan mengimbangi anggota partai pusat serta digantikannya 1/3 anggota Komite Sentral di tiap kongres. Dapat dilihat disini, bahwa jika pergantian setiap 1/3 anggota Komite Sentral dilakukan dis etiap kongres dari tahun 1976, maka pada tahun 1986 anggota Komite Sentral merupaakn anggota yang sma sekali baru dari anggota Komite sentral sebelum tahun 1976 yang kebanyakan merupakan generasi tua.

Perubahan penting ini, yaitu meningkatkan anggota yang berusia lebih muda, berpendidikan lebih baik dan secara teknis lebih mampu dari para anggota terdahulu serta meningkatnya anggota dari perwakilan partai di propinsi, cukup berpengaruh terhadap masalah-masalah yang kemudian diangkat sebagai tema diskusi. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang mengarah pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang reformis mendapat banyak dukungan.

Mundurnya kepala pemerintahan Pham Van Dong, ketua sekretariat Partai Le Duc Tho dan mundurnya Kepala negara Truong Chinh yang dianggap sebaagi representasi dari kekuatan faksi konserfativ dalam Politbiro menyebabkan reformis mendapat jalan yang semakin lebar melalui Nguyen Van Linh.

3. Usaha-Usaha Penerapan Reformasi

Terpilihnya Nguyen Van Linh sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam memberikan jalan yang luas bagi kebijakan-kebijakan yang reformis dalam bidang ekonomi meski perimbangan kelompok konservatif masih mewarnai beberapa kebijakan politik dan sosial. Ia menyerukan Doi Moi untuk meningkatkan produksi dan standar hidup rakyat Vietnam serta pemberantasan korupsi yang telah berakar di dalam organ negara maupun partai. Can Than dalam peranan kepemimpinan partai di dalam negara di satu sisi, sementara di sisi lain Linh menekankan pentingnya pengurangan intervensi partai terhadap organ fungsional pemerintah maupun non pemerintah. Cong Khai memperkuat hubungan antara negara dan rakyat merupakan ide Nguyen Van Linh yang semakin memperjelas arah kebijakannya yang cenderung reformis.

a. Usaha Reformasi Pertanian

Di dalam pertanian, kebijakan product contract system masih mendapatkan tempat dalam kebijakan pertanian Linh. Meski sistem ini pernah mengalami kegagalan di pertengahan tahun 80an, Linh berusaha memperbaiki kebijakan tersebut melalui serangkaian kebijakan baru. Pada satu kesempatan dalam Kongres Petani Vietnam (salah satu konstituen Vietnam Fatherland Front) yang pertama tahun 1988, Linh mengatakan bahwa kolektifisme yang dipaksakan di selatan dulu adalah suatu kesalahan dan oleh karenanya kolektifisme saat ini dilaksanakan berdasarkan atas asas sukarela dan dilakukans secara bertahap sedangkan peranan petani swasta telah mendapatkan pengakuan dalam jalan sosialisme. Petani juga dibebaskan menjual hasil pertanian dengan harga yang rasional tanpa dikenakan kuota yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh petani. Namun, sebaliknya petani mempunyai kewajiban untuk

membayar pajak pertanian (William Duiker, 1989:354). Hal ini disosialisasikan melalui resolusi Politbiro No. 10/NQTU April 1988. Resolusi ini memuat komoditas produk sosialis, yaitu 1. Membentuk kondisi yang mendukung bagi sektor individu dan swasta untuk membangun produksi, processing, proses dan perdagangan dalam pertanian, 2. Menggarisbawahi end product system, dimana petani terlibat langsung dalam penanaman hingga panen dan pemasaran, 3. Menitikberatkan investasi pertanian dan pemasukan bagi industri.

Ekonomi rumah tangga pun mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk bernegosiasi dengan negara atau dengan perusahaan kolektif dalam rangka penyediaan bahan pangan dan mendapat kesempatan untuk memiliki tanah. Land Law yang disetujui oleh Majelis Nasional pada tanggal 29 Desember 1987. Hukum ini mengatur kepemilikan tanah di bawah manajemen negara. Negara memberikan tanah kepada pengguna yang meliputi organisasi dan individu serta pengguna asing bagi penggunaan jangka panjang dan pendek.

Jika pada kebijakan yang lalu Vietnam mengalami kegagalan karena cuaca yang kurang menguntungkan dan hama penyakit yang menyerang ratusan ribu ton padi, maka dengan adanya penekanan pertanian pada Kongres ke -6, Perdana Menteri Vo Van Kiet menggeser investasi dan industri berat untuk mencukupi kebutuhan pupuk dan pestisida bagi pertanian.

Namun demikian, ternyata Vietnam masih menghadapi bahaya keurangan pangan yang diumumkan oleh Menteri pertanian pada buakn April 1988 dan membutuhkan lebih banyak pupuk dan pestisida. Krisis pangan ini mengakibatkan 10 juta penduduk Vietnam utara membutuhkan 120.000 ton beras yang harus didatangkan

dari luar negeri (Ronald J. Cima) Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya pertanian Vietnam karena tidak ditunjang oleh mekanisme dan fasilitas yang baik serta lemahnya sistem insentif bagi petani.

Protes petani untuk pertama kalinya terjadi tahun 1988 di Ho Chi Minh City yang menuntut untuk dikurangi atau bahkan dihentikannya kolektifisme dalam pertanian dan dikembalikannya tanah dan atau diperbolehkannya tanah untuk disewa dalam kurun waktu yang lebih lama serta mengenakan sanksi kepada pejabat lokal yang menghalangi dikembalikannya kepemilikan tanah. Politbiro segera mengeluarkan instruksi No. 47 bulan Agustus 1988 yang memerintahkan agar masalah dapat diselesaikan dengan cara yang baik yaitu dengan mengadakan perdebatan terbuka di level bawah dan diwarnai dengan semangat untuk berkompromi. Namun, permasalahannya tidak berhenti begitu saja sebab, pungutan pajak pertanian mengalami kendala karena tidak sedikit petani yang bersedia membayar. Menghadapi kenyataan semacam ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan pembayaran pajak bagi anggota kolektif dan petani mandiri yang berlaku pada tahun 1990-1991 (Kim Ninh, 1990:389). Tuntutan petani ini membuahkan hasil yang positif dimana pada tahun 1989 hampir 90% produksi padi dan juga peternakan berada di tangan swasta. Petani dan peternak yang tadinya bekerja untuk memenuhi kuota pemerintah, setelah adanya reformasi di bidang pertanian mereka bekerja untuk mendapatkan keuntungan. Produksi meningkat dan akhirnya di tahun 1989 Vietnam berhasil menjadi pengeksport beras nomor 3 terbesar di dunia yang mencapai 1,4 juta ton yang dieksport ke Afrika Selatan, Philipina, Cina, India dan Srilanka (Kim Ninh, 1990:389). Dan dalam kurun

waktu 2 tahun Vietnam berhasil mengatasi bencana kekurangan pangan dan menghentikan impor bahan pangan (Tan Kee Wee, 1991:316).

b. Usaha Reformasi Industri dan Perdagangan

Pada bidang ini pemerintah menetapkan socialist accounting, diaman perusahaan negara diharapkan untuk dapat bekerja secara mandiri dan lebih mempehitungkan laba serta tidak lagi hanya menunggu perintah saja dari pusat. Sesuai dengan Resolusi Sidang Pleno ke-3 Komite Sentral dari Konres ke-6 (Vo Nanh Tri, 1990:199). Sektor swasta akan mendapatkan tempat yang lebih luas tanpa banyak kerumitan yang harus dihadapi seperti yang seringkali terjadi sebelumnya. Sementara itu subsidi sebelumnya. Sementara itu subsidi untuk barang konsumsi yang merupakan sumber utama pemborosan dalam anggaran negara dihapuskan. Pada bulan Juli, Politbiro mengeluarkan Resolusi No. 16-NQTU yang memperkuat usaha swasta dan sektor kolektif dalam bidang manufaktur dan usaha ekonomi komersial serta memberikan otonomi yang lebih luas kepada Vietnam Selatan. Hasil dari perubahan sistem manajerial ini terlihat pada peningkatan pada industri kecil yang naik 25,6% dari tahun 1985-1988. Meskipun bukan angka yang cukup besar, hal ini berarti banyak usaha untuk menggeser penekanan industri ringan telah dilakukan.

Aturan-aturan baru bagi investasi asing mulai diperkenalkan dalam rangka menarik sebanyak mungkin modal asing. Aturan baru yang telah disetujui oleh Majelis Nasional pada Desember 1987 untuk menggantikan aturan baru tahun 1977 dan diberlakukan pada 9 Januari 1988 berdasarkan pandangan partai bahwa, to create further condition for exploiting satisfactory all potentials (of the country and) broaden relations

and economic, scientific, technical cooperation with the outside world in order to serve the cause of socialist construction (Vo Nanh Tri, 1990:205).

Dari argumen ini maka pemerintah memperbolehkan pelaku bisnis asing dan investor asing beroperasi di Vietnam. Bentuk-bentuk investasi yang ditetapkan di kemudian adalah: 1. Kerjasama bisnis berdasarkan kontrak seperti pembagian produksi dan manajemen, 2. Joint-venture antara investor asing dan organisasi ekonomi Vietnam dan 3. Perusahaan asing penuh. Hasil yang menggembirakan segera diperoleh Vietnam dengan rencana dibangunnya kilang minyak dekat Ho Chi Minh City untuk memproduksi minyak bagi pengguna lokal atas kerjasama dengan perusahaan Perancis. Pada bulan berikutnya pemerintah mengumumkan bahwa kerjasama-kerjasama berikutnya segera akan terbentuk untuk mengadakan eksplorasi, misalnya kerjasama yang dilakukan dengan Indian Oil and Natural Gas Commission, perusahaan Petrofina milik Belgia dan Shell Oil milik Belanda. Diharapkan dengan banyaknya eksplorasi yang dilakukan, Vietnam akan mampu mandiri dalam bidang energi. Sedangkan Perusahaan Perancis Atatel siap untuk membangun jaringan telepon Vietnam.

Sementara itu, Vietnam juga mengadakan persetujuan mengenai bantuan perdagangan dan teknik dengan negara-negara Jepang, Singapura, Indonesia, Swedia, India, Thailand, dan Cina. 1 Januari 1988, pemerintah Vietnam menawarkan penundaan pajak selama dua tahun bagi joint ventures, penghapusan pajak bagi beberapa barang ekspor atau impor serta jaminan terhadap amanah investasi asing. Pemerintah juga mendirikan badan baru guna menangani masalah ini yaitu dengan mendirikan manajemen Investasi Asing (Ronald J. Cima, 1989:67)

Sayangnya inflasi yang naik drastis hingga 700% akibat dihapuskannya subsidi dapat mengancam mundurnya investor asing dan dapat menimbulkan gejolak sosial politik karena tidak mencukupinya lagi pendapatan bagi konsumsi. Menghadapi kondisi ini pemerintah Vietnam mengambil rekomendasi dari IMF guna menanggulangi kondisi tersebut, yaitu dengan rencana penghematan anggaran. Rencana ini meliputi pengetatan kredit, pengurangan subsidi negara terhadap beberapa jenis barang konsumsi, pengurangan pegawai pemerintah dan perusahaan milik negara serta meningkatkan suku bunga guna meningkatkan tabungan masyarakat guna mendapatkan dana bagi pembangunan. Kebijakan devaluasi terhadap Dong pun diambil pemerintah guna menyesuaikan dengan kondisi pasar gelap yang terus menjamur serta semakin ramainya mata uang asing yang beredar akibat meningkatnya investasi. Meningkatnya investasi asing ini juga dipicu oleh kebijakan pemerintah untuk menarik pasukannya dari Kamboja. Kebijakan ini terbukti memberikan hasil yang cukup positif dengan dapat ditekannya laju inflasi menjadi 2,8% tiap bulannya pada tahun 1989.

Namun demikian, kebijakan Vietnam ini ternyata membawa dampak yang kurang menguntungkan di sisi lain, yaitu ketiaknya beberapa perusahaan negara tidak lagi mampu berjalan sebagaimana mestinya karena kebijakan pengurangan subsidi. Ditengarai bahwa hanya 30% perusahaan yang masih berfungsi, 40% berada dalam masalah dan 30% harus gulung tikar (Kim Ninh, 1989:388). Akibatnya pengangguran pun meningkat tajam di Vietnam yang mencapai 20% dari angkatan kerja.

4. Perubahan dalam Sosial Politik

Perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh pelaksanaan liberalisasi ekonomi yaitu, pelonggaran terhadap aktifitas ekonomi, pengurangan instruksi pusat serta penghapusan subsidi terhadap barang konsumsi dan juga subsidi terhadap pers, telah menghasilkan konsekuensi-konsekuensi logis yang mendorong masyarakat kepada ide kebebasan politik dan bahkan pluralisme politik. Hal-hal semacam ini juga terdorong oleh perubahan kondisi internasional dimana paham sosialisme dan komunisme mendapat serangan yang tajam dari paham liberalisme, karena kegagalannya dalam mengelola sebuah negara. Keruntuhan beberapa negara sosialis dan komunis di Rusia dan Eropa Timur serta destabilisasi RRC telah membuat para elit politik di Vietnam berusaha mengantisipasi penuh dari gejolak tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh partai antara lain adalah mengeluarkan pernyataan-pernyataan resmi partai sehubungan dengan kebijakannya mengenai demokrasi dan pluralisme, menerbitkan sejumlah hasil penelitian mengenai kader partai, pendisiplinan kader partai bahkan kontrol terhadap massa dan orang-orang asing dengan sangsi.

a. Tekanan terhadap Ide Pluralisme Dalam Partai

Bagi para elit politik Vietnam, kebijakan yang harus ditempuh menjadi sangat rumit ketika pada satu sisi mereka menginginkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, sedang di sisi lain ideologi komunisme yang sudah diraih dengan harga yang sangat mahal tidak boleh dikorbankan. Dilema ini menjadi satu tema penting dalam perdebatan dalam Komite Sentral maupun Politbiro. Jika liberalisasi yang sedikit banyak telah menunjukkan hasil yang positif dalam mendongkrak pereronomian vietnam dipercepat maka, akan ada resiko sosial politik yang harus ditanggung oleh

vietnam. Resiko tersebut antara lain adalah semakin longgarnya kontrol partai terhadap massa, termasuk kader partai, karena kelonggaran yang telah diberikan dalam aktifitas ekonomi. Kelonggaran yang telah diberikan tersebut tentu akan berimbas juga pada segi kehidupan masyarakat yang lain.

Kondisi semacam ini menjadi satu indikasi yang tidak menyenangkan bagi para elit yang beranggapan bahwa ideologi komunisme mulai mendapat tantangan. Padahal; mereka meyakini bahwa ideologi ini merupakan jawaban bagi bangsa Vietnam,

Program lain dari Doi Moi adalah memperbaiki tingkat keterbukaan masyarakat vietnam. Di bawah kepemimpinan Le Duan yang menjalin hubungan dengan kelas pekerja melalui konsep Collective Mastery justru membuat hubungan antara partai, pemerintah dan massanya tidak lagi dapat berkembang dengan baik. Demi memperbaiki kondisi ini Linh segera melakukan beberapa strategi guna mengubah pola pikir bagi landasan reformasi selanjutnya, antara lain dengan menulis sebuah artikel yang berjudul "Things that Must be Done Immediately" dalam surat kabar Nanh Dan yang mengkritisi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh partai dan mengajak untuk mengungkapkan secara terbuka ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat (William P. Duiker, 1989:357).

Awal tahun 1988 dalam pertemuan dengan Politbiro ia dengan tegas menyatakan bahwa Artikel 4 dari UUD Vietnam harus dipertahankan, Artikel tersebut menyebutkan bahwa partai komunis adalah satu-satunya kekuatan utama dan negara dan masyarakat. Pernyataan Linh ini juga merupakan tanggapan atas munculnya Poland Solidarity dan munculnya gejala pluralisme secara umum di Eropa Timur. Pada bulan Mei 1989 dalam Sidang pleno ke-6 Komite Sentral, Linh berusaha untuk menghalangi

pengaruh peristiwa Tiananmen dengan melontarkan sebuah orasi "Why We Don't Accept Pluralism". Orasi Linh ini dikeluarkan sehubungan dengan mulai adanya tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa Vietnam terhadap partai dan negara. Meskipun oleh Komite Partai Hanoi, tuntutan ini segera dieliminir dengan memberikan konsesi berupa beasiswa, perbaikan makanan dan perumahan.

Pada perayaan ke-44 Revolusi Agustus pada tanggal 1 September 1989 Linh menyatakan "Democracy does not mean that one is free to say what one wants to, write what one's to write because these are anarchist acts and, indeed pluralism itself is a scheme of imperialism" (Charles A. Joiner, 1990:1055). Orasi Linh ini kemudian dimuat oleh Su That Publishing House dengan judul "Following the Road Chosen by Uncle Ho" dan didistribusikan kepada seluruh anggota partai dan organisasi massa. Menanggapi runtuhnya sosialisme di Eropa Timur pada akhirnya tahun 1989 dan awal 1990, Linh mengakui keseriusan pembangunan yang dilakukan Eropa Timur, namun Vietnam akan tetap menempuh jalannya sendiri dan melawan setiap kekhawatiran anti sosialis, merenovasi kepemimpinan partai, meningkatkan demokrasi dalam partai serta memperbolehkan dialog dalam kerangka demokrasi sentralisme, disiplin partai dan mengabdikan pada suara mayoritas.

Pada sidang Pleno Komite Sentral ke-7 Agustus 1989 yang membahas mengenai isu ideologi menekankan bahwa pemerintahan satu partai harus dipertahankan, tidak ada akses bagi pluralisme dan juga demokrasi multipartai. Atas dasar keputusan sidang ini, maka para penulis dan seniman dibatasi untuk tidak menentang sosialisme. Kebijakan ini berlaku pula bagi pers dan penerbitan.

Namun demikian, fenomena pluralism tersebut terlihat semakin nyata ketika control terhadap produksi sebagai jalan bagi liberalisasi ekonomi, mulai mempengaruhi berbagai bidang yang lain terutama dengan adanya penghapusan subsidi negara. Usaha untuk tetap mempertahankan kekuasaan tunggal partai dilakukan tidak saja dengan mengeluarkan pernyataan resmi partai tetapi juga melalui tekanan-tekanan yang lebih nyata. Tran Xuan Bach, anggota Politbiro, berpendapat bahwa ide-ide politik yang berkembang di Vietnam sangat beragam dan partai harus berhenti menjadi organ negara mauoun organ social (Charles A. Joiner, 1990:1058). Akibatnya, pada siding pleno ke-8 beliau dikeluarkan dari keanggotaan di Politbiro dan Komite Sentral dengan alasan bahwa ia telah mengkhianati prinsip-prinsi dan disiplin organisasi partai serta telah membawa akibat-akibat yang buruk.

Demikian pula yang terjadi dengan Duong Thu Huong, Bui Thin, Nguyen Khac Vien serta Hoang Minh Ching. Aktifitas Huong yang dinilai sangat berani mengkritisi partai, emmebuatnya dikeluarkan sebagai anggota partai pada Juli 1990 dan ditahan pada April 1991. Huong pernah menyerahkan rekaman wawancara dengan seorang reporter dari Vietnam Selatan mengenai kesalahan bangsa Vietnam mengambil marxime sebagai ideology. Ia juga menolak prinsip-prinsip idelogi tersebut, demokrasi sentralisme dan kediktatoran proletariat. Huong juga menulis Blind paradise yang bercerita mengenai reformasi tanah yangd ialkukan secara brutal di tahun 1956 oleh pemerintah Vietnam. Ia juga seringkali menyatakan kritiknya terhadap partai di berbagai pertemuan. Atas aktifitasnya ini ia dikeluarkan dari keanggotaan partai.

Bui Thin, mantan pejuang, anggota partai dan editor di Nanh dan, juga mengalami nasib yang sama setelah mempublikasikan pandangannya ke luar negeri.

Komentarnya yang dimuat di Doan ket pada November 1990 dengan judul "Citizen's Petition dan seangkaian intervies dengan BBC berisi mengenai krikitan terhadap kepemimpinan partai dan sosialisme. Ia juga menyerukan untuk diwujudkan rezim yang demokratis dan mengusulkan penggantian nama dari Communist Party of Vietnam dan Socialist Republic of Vietnam menjadi Vietnam Worker's party dan Democratic Republic of Vietnam.

Nguyen khac Vien dan Hoang Chinh berpendapat partai tidak saja mempergunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang tetapi sudah mulai mengalami kemunduran. Oleh Karenanya, baik Vien dan Chinh mengusulkan untuk mengembalikan kekausaan politik pada oragan-organ yang dipliha secara demokratis, memberikan toleransi pada pluralism dan pemerintahan yang dibentuk haruslah berada di bawah hukum yang menjaga persatuan nasional. Menurut mereka Vietnam sedang mengalami risis dan hal itu disebabkan oleh system satu partai tersebut. Kegagalan ekonomi pun seharusnya dapat diatasi dengan inestasi asing dan pertumbuhan ekonomi swasta. Keduanya memang tidak sekeras Huong dan Tin dalam mengkritisi partai, namun suara-suara semacam ini telah memberikan warna lain pada Partai Komunis Vietnam, sebab bagaimanapun juga masih banyak mereka yang menghendaki partai sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan.

Meskipun sudah ada usaha pendisiplinan kader partai, masih saja perilaku mereka menyimpang dari yang diharapkan. Pada tahun 1989, 12 % dari anggota partai diberhentikan. Pada bulan Febuari 1990 buletin bulanan partai, Communist Review atau Tap Chi Cong San, memuat hasil penelitian terhadap anggota partai. Dari penelitian tersebut disimpulkan bhawa 30% dari 41.777 anggota sel partai memiliki

kelemahan yang sangat parah, 60% gagal membangun peranan sebagai teladan, 10% adalah oportunis yang memanfaatkan kedudukan dan kekausaannya, korup serta bergaya hidup mewah dan hanya 30% yang lain yang masih mempertahankan kualitas dan etika revolusi. Pada tahun yang sama partai melakukan pembersihan di tempat pelacuran di luar kota Ho Chi Minh City dan subsidi ilegal. Dari hal ini belasan orang dikeluarkan dari keanggotaan partai.

b. Penekanan terhadap Massa

Reformasi ekonomi yang memberikan kelonggaran terhadap aktifitas ekonomi telah membawa dampak pada meningkatnya import radio, VCD, tape, televisi dan mesin fotokopi. Menurut laporan pemerintah, pada tahun 1989 ada 40.000 video recorder yang telah beredar di Vietnam dan hanya setengahnya saja yang terdaftar. Akibat dari meningkatnya alat telekomunikasi ini maka pemerintah semakin kesulitan untuk mengontrol informasi dari luar, khususnya yang bertentangan dengan kebijakan partai. Melalui satelit, televisi Soviet secara rutin melaporkan manuver gorbaches dan disintegrasi Uni Soviet. Demikian pula BBC, VOA, dan Radio Australia. Segala hal yang dapat ditangkap tersebut direkam dan ditranslasikan dan kemudian diedakan oleh Tuoi Tre salah satu organ anggota Ho Chi Minh City, Communist Youth Union. Tentu saja ini bertentangan dengan kebijakan kantor Berita Vietnam yang seharusnya bekerja untuk kepentingan partai. Selain beirta elektronik yang dapat ditangkap oleh masyarakat Vietnam, surat kabar dan majalah asing juga telah dapat dibeli di kota-kota besar di Vietnam, antara lain Bangkok Post, international Herald Tribune, far eastern Economic review dan Newsweek.

Liberalisasi ekonomi yang da pada akhirnya telah membuka jalan bagi berbagai informasi asing, mulai mempengaruhi aktifitas politis masyarakat Vietnam. Konsisi ini telah terbukti dengan munculnya demonstrasi yang dilakukan petani di ho Chi Minh pada tahun 1988.

Suara-suara dari pelajar dan mahasiswa juga telah mulai terdengar menanggapi kebijakan yang diskriminatif, kurikulum yang ketinggalan, kondisi belajar yang buruk, dan kurang otonommua istitusi pendidikan. Pada April 1989 beberapa ratus mahasiswa berdemonstrasi di depan kantor komit Rakyat di Ho Chi Minh City menuntut perbaikan kondisi. Sedangkan mahasiswa College of Communications and Transport di hamoi memboikot kantin karena kualitas makanan yang buruk. Tuntutan terhadap demokratisasi kampus pun mulai marak di universitas dan politeknik. Namun demikian, salah seorang dari mahasiswa ini Huynh tan mam, dikenai tahanan rumah karena ajakannya menegakkan demkrasi pada suatu pertemuan mahasiswa di Saigon.

Meskipun demikian, tuntutan yang tidak bersifat menentang supremasi partai masih mendapat jalan, seperti kebijakan yang dinilia diskriminatif terhadap calon mahasiswa ditiadakan, perubahan kurikulum dengan pemuatan kurikulum mengenai paar, managemen bisnis dan pariwisata serta perbaikan konsisi belajar mengajar. Pendirian sekolah dan universitas swasta pun dibuka dan pemberian otyonomi kampus termasuk juga bagi pilihan rektor.

Protes yang dilakukan oleh kaum intelektual pun sudah dapat disinyalir melalui media massa yang mengkritisi kondisi ekonomi, social mapun politik, Setelah subsidi terhadap surat kabar, majalah dn penerbitan dipotong pada tahun 1987, maka mereka berusaha untuk mendapatkan dana dengan cara meningkatkan oplah dan

langganan. Demi meningkatkan penjualan maka pra redaktur pun mulai memuat berita yang menarik dibaca oleh masyarakat luas. Tema-tema yang menarik, selain usulan Linh seperti korupsi, antara lain adalah ekekrasan dan pelecehan seksual. Berita politis pun mulai marak. Tuoi Tre mulai mengekspos kejadian politis di Eropa Timur dan Korea Utara. Penulis lain mempergunakan alur fiksi untuk mengangkat tema yang tabu untuk dibicarakan.

Kelompok kepentingan juga mulai berdiri dalam rangka mencapai kepentingan tertentu yang tidak diakomodir oleh partai. Salah satunya adalah Lien Dang Cach Mang Vietnam atau Coalition of Vietnamese National Parties. Sesungguhnya organisasi ini sudah berdiri sejak tahun 1984 dan anggotanya pun merupakan organisasi-organisasi yang sudah cukup lama ada. Namun aktifitasnya mulai terlihat pada tahun 1986. Sejak berdirinya Socialist Republic of Vietnam, tidak ada kerangka kerja yang fundamental sebagai hak dan kebebasan individu. Untuk itu organisasi ini berdiri dengan tujuan; 1. Menginformasikan kepada dunia internasional pelanggaran HAM di Vietnam, 2. Membentuk jaringan internasional dan 3. Membawa kembali kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang demokratis. Aktifitas yang pernah dilakukannya antara lain adalah Peace and Freedom Operation, 10 Juni-20 September 1986, Dang Xuan Operation 20 Februari – 18 Maret 1993 dan Orchid Exercise November 1995 –April 1996.

Organisasi lain adalah Lie Minh Vietnam Tu Do atau Free Vietnam Alliances yang bergerak dalam bidang politik untuk menekan pemerintah agar lebih demokratis. Tujuannya adalah demokrasi pluralis, kebebasan dan hak asasi manusia, keadilan social dan ekonomi pasar. Organisasi yang bergerak dalam HAM dan reformasi politik yang lain adalah National Progressive Front. Organisasi ini didirikan oleh Nguyen

Dan Que yang juga anggota Amnesti International dan penulis “New Line for Humanist and Progressive Society” yang berisi mengenai penghapusan sosialisme di Vietnam. Aktifitas dan tulisan Que ini dinilai subversive dan Que dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh pengadilan Rakyat Ho Chi Minh Juli 1990

Kesulitan ekonomi pun telah memaksa sejumlah veteran oerang membentuk sebuah kelompok untuk memperjuangkan nasib mereka dalam Club of Former Resistance Fighters yang dibentuk hamper bersamaan dengan Kongres National Partai ke-6. Klub ini diketuai beberapa anggota partai seperti Nguyen Ho, Tran Bach Dan dan Tran Van Tra. Pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para veteran perang. Namun aktifitasnya mulai meingkat dengan diadakannya sejumlah pertemuan dan dikusi rutin. Dikusi yang mereka lakukan itu juga direkam dan mulai dipublikasikan secara luas. Truyen Thong Khang Chien (Resistance Tradition) merupakan surat kabar yang kemudian diterbutkan oleh organisasi tersebut. Peranan klub ini semakin terlihat sebagai oposisi yang terhadap partai. Pada berbagai orasi dan tulisan mereka, secara nyata menyalahkan Politbiro aats reunifikasi kedua Vietnam dan program kolektifisne yang banyak mematikan potensi rakyat. Mereka meminta agar Doi Moi dijalankan dengan penuh. Mereka punmengharapkan adanya keterbukaan dalam hal politik selain keterbukaan ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut pada bulan April 1988, klub ini mengumpulkan 100 tanda tangan yang kemudian diajukan kepada Komite Sentral dan majelis Nasional meminta untuk diadakannya pemilihan umum yang bebas, adil dan rahasia.

Aktifitas klub yang banyak membuat gerah elit partai ini banyak mengundang perhatian dunia internasional. Tahun 1988 dan 1989, kementrian Informasi

menerbitkan instruksi untuk menghentikan peredaran beberapa surat kabar termasuk surat kabar yang diterbitkan klub ini. Namun, instruksi ini ditolak oleh CFRF karena bertentangan dengan artikel 67 Konstitusi Negara. Kegagalan partai mengontrol klub ini mendorong partai mendirikan Vietnam War Veteran' Association tahun 1990 dan menjadikan Jenderal Purnawirawan Tran Van Tra sebagai ketuanya. Organisasi ini bertujuan membentuk opini massa dan kepemimpinan yang beroperasi dalam sistem yang ada. Tampaknya usaha ini cukup berhasil karena pada akhir 1990, VWVA mengklaim telah merekrut 900.000 orang anggota dari 55 propinsi.

Agaknya kekhawatiran pemerintah mulai berlebihan dengan ditingkatkannya kontrol keamanan internal. Selain meningkatkan kontrol terhadap pendidikan, penerbitan, aktifitas veteran, seni bahkan agama, partai juga meningkatkan kontrol terhadap kegiatan masyarakat umum. Hal ini disebabkan karena pemerintah khawatir kegiatan tersebut berubah menjadi demonstrasi.

Di antara rencana strategis pembangunan ekonomi Vietnam, Doi Moi, masih terlihat bagaimana setiap faksi berupaya mengimbangkan beberapa kebijakan antara kebebasan pasar dan kontrol partai terhadap kebebasan individu. Tampak bahwa konsekuensi-konsekuensi dari diterapkannya kebijakan ekonomi yang lebih terbuka yaitu diakuinya peran swasta, investasi asing dan pengurangan subsidi, belum masuk sebagai agenda politik. Akibatnya elit justru melakukan represi terhadap segala aktifitas sosial politik massa yang dianggap membahayakan partai. Hal ini menunjukkan bahwa liberalisasi dan reformasi akan membawa akibat munculnya anarkhi dan hilangnya kontrol partai. Kekhawatiran ini kemudian menjadi alasan bagi kelompok konservatif untuk mempengaruhi kebijakan Politbiro selanjutnya. Apalagi dengan melihat kenyataan

bahwa, adanya generasi baru yang tidak terlibat secara langsung dalam perang Vietnam. Konsisi ini akan berpengaruh terhadap berkurangnya nilai-nilai partai. Pendapat ini cukup beralasan dengan terdaptarnya 69.000 anggota dari 4,2 juta penduduk Ho Chi Minh tahun 1988 (Ronald J Cima, 1990:65). Mundutnya Truong Chinh dan Pham Van Dong sebagai Kepala Negara dan perdana Menteri segera digantikan oleh mereka yang juga memiliki pandangan yang cenderung konservatif Vo Chi Chong dan Pham Hung Juni 1987. Namun meninggalnya Pham Hung yang mendadak menempatkan Wakil Perdana menteri Vo Van Kiet yang reformis sebagai pejabat sementara. Naiknya Kiet member harapan bagi kelompok reformis bagi percepatan program-program mereka. Sayangnya jalan Kiet tidak mulus setelah Dewan national memutuskan Do Muoi yang anggota Komite Sentral konserfativ menempati posisi perdana mnteri. Meskipun mendukung ide Linh yang berkomitmen untuk menggunakan tekhnik kapitalis untuk mempromosikan modernisasi negara dan perusahaan kolektif, ia cenderung menekankan investasi dari negara-neagar sosialis dan masih tetap mempertahankan kekuasaan tunggal partai dalam menghadapi musuh, para penjahat dan kelompk reaksioner.

BAB. VI

PENUTUP

Kondisi internal partai yang merefleksikan perimbangan antara mereka para reformis dan konservatif, diimbuhi pula oleh peruabahn kondisi internasional,

dimana sosialisme mengalami suatu kemunduran. Di Soviet bahkan, komunisme telah runtuh sama sekali, demikian pula di Eropa Selatan. Pengalaman Cina dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa di Tiananmen Square yang menewaskan ribuan orang bukanlah contoh yang baik bagi Vietnam. Oleh karenanya, pemerintah Vietnam semakin terlihat ragu dalam mengambil kebijakan.

Di satu sisi, kepemimpinan kolektif partai memberikan jalan bagi reformasi social maupun politik terhadap media massa dan komunitas intelektual. Kesempatan bagi media massa untuk berkembang lebih baik adalah dengan memberikan izin beredarnya surat kabar swasta. Pada bulan Desember 1989, majelis nasional menyetujui aturan baru bagi pers, Aturan ini menyatakan bahwa keberadaan surat kabar swasta adalah sangat penting dan untuk kepentingan tersebut harus ada ijin untuk menerbitkannya. Pengangkatan atau pemberhentian kepala surat kabar atau editor dapat dilakukan secara intern dengan suara bulat. Keleluasaan bagi masyarakat lain pun mulai diakomodasi meski dalam skala yang sangat terbatas, seperti yang diberikan kepada para mahasiswa dan juga para veteran yang mendirikan Club of Former resistance Fighters.

Namun demikian, pada sisi yang lain control partai terhadap segala kemungkinan adanya oposisi pun masih sangat terlihat jelas. Pemerintah Vietnam mendukung apa saja yang dilakukan pemerintah Cina dalam kejadian Tiananmen Square pada tahun 1989, meski ia tidak lagi ingin melakukan hal brutal yang sama yang telah dilakukan oleh pemerintah Deng. Bagi Vietnam kejadian tersebut memberikan pelajaran yang sangat jelas bahwa terlalu banyak kebebasan politik yang diberikan justru akan membawa keributan yang membahayakan monopoli partai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hewison, Kevin, Richard Robison dan Gary Rodan (eds.), *South-East Asia in the 1990es Authoritarianisme, Democracy and Capitalism*, Allen and Unwin Pty. Ltd., New South Wales, 1993.

Hitchner, Dell Gillette dan Carol Levie, *Comparative Government and Politics 2th ed.*, Harper and Row Publisher, New York, 1981

Meier, GERALD M., ed., *Politics in Policy Making in Developing Countries, Perspective in the New Political Economy*, An International Center for Economic Growth Publication, ICS Press, San Francisco, California, th. 1991.

Porter Gareth, *Vietnam the Politics of Bureaucratic Socialism*, Cornell University, th. 1990.

Tri, Vo Nhan, *Vietnam's Economic Policy Vietnam's Policy Since 1975*, Institute of Southeast asian Studies, Singapore, th. 1990.

B. Terbitan Berkala

Cima, Ronald J., "Vietnam in 1988 the Brink of Renewal", *Asian Suvery*, Vol. XXIX, No. 1, Januari 1989.

Duiker, William, "Vietnam A Revoltionary in Transition", *Southeast Asian Affairs*, th. 1989.

Joiner, CharlesA., "The Vietnam Communist Party Trives to Remain the "Only Force", *Asian Survey*, Vol. XXX, No. 11, November 1990.

Pike, Douglas, "Vietnam in 1990 the Last Picture Show", *Asian Survey*, Vol. XXXI, No. 1
Januari 1991.

Stern. Lewis M., "The Scramble Toward Revitalization, The Vietnamese Communist
Party and the Economic Reform Program", *Asian Survey*, Vol, XXVII, No. 4,
April 1987

Stern, Lewis M., "Party Plenum and Leadership Style in Vietnam", *Asian Survey*, Vo.
XXXV, No. 10, Oktober 1995.

Taylor, KW, "Vietnam in 1984 Confidence Amidst Adversity", *Southeast Asian Affairs*, th.
1985

Thayer, Carlyle, "Vietnam's Sixth Party Congress: An Overview", *Contemporary Southeast
Asia*, Vol. 9, Number 1 Juni 1987.